

TEOLOGI POLITIK YESUS: SUMBANGSIH MATERI BAGI MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI POLITEKNIK AMAMAPARE TIMIKA

JIMMY RUNGKAT

Dosen Agama Kristen di Politeknik Amamapare Timika
(Email : jimmypoltekamtim@gmail.com)

ABSTRACT

The purpose of this study was to understand the characteristics of Jesus' Political Theology as a contribution to the Christian Education Course at the Politeknik Amamapare Timika. The method used in this research is library research and through hermeneutic-exegesis approach. This research involves the researcher fully to obtain a complete understanding of the intent conveyed by the writer of the scriptures regarding the context that gives meaning by using the processes of text analysis, narrative analysis, and theological meaning. The results show that Jesus' political theology departs from the theme of the Kingdom of God, which is presented on earth as a system of political thought and action that is balanced by every Christian. In its realization, truth and justice have always been the foothold and the Greatness of God is the main goal of various forms of power in the world which is driven by a high dedication to carrying out political duties in helping others who are experiencing difficulties because of feelings. sympathy and empathy on the basis of true love for social problems. Characteristics of Jesus' Political Theology as a framework of thought and framework The socio-political role of Christianity in Indonesia is oriented towards the general welfare, synergizing religion and state which rejects state religion and state religion, theocracy in democracy, guarantees human rights, rejects discrimination, and realizes laws that do not impartial and uncompromising.

Keywords: *Socio-Political, Christian Education, Political Theology of Jesus,*

PENDAHULUAN

Politik merupakan tema sentral dari semua realitas kehidupan manusia dalam suatu negara, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Betapa tidak, politik menjadi titik berpijak terbitnya berbagai kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan warganya. Bahkan, politik disebut sebagai jantung bagi kehidupan bangsa dan negara (Anggara, 2013:vii).

Kata politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani *polis* yang artinya city-state (negara kota). Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik (Anggara, 2013:3).

Terlepas dari berbagai permasalahan politik yang diciptakan oleh beberapa politikus kotor di Indonesia dewasa ini, pemahaman politik yang benar dan bermartabat adalah hal

yang sangat penting serta urgen bagi setiap warga negara. Di dunia Perguruan Tinggi, pendidikan politik menjadi suatu keniscayaan bagi mahasiswa sebagai insan akademis dan sekaligus sebagai salah satu pelopor masa reformasi di Indonesia. Hal ini pun menjadi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen sebagai salah satu Mata Kuliah Umum Wajib di Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk di Politeknik Amamapare Timika, harusnya menjadikan tema politik sebagai salah satu materi pokok, yang pastinya ditinjau dari sudut pandang Iman Kristen. Sebab Pendidikan Agama Kristen harus memberikan pencerahan agar mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi (Prodi) teknik, tidak hanya mengurus pelbagai hal tentang ilmu teknologi, tapi juga mampu menghormati kehidupan personal dan sosial dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia serta memiliki pengetahuan agar tidak anti politik dan mau ikut terlibat dalam memberikan sumbangan pemikiran-pemikirannya yang

berdasarkan iman Kristen pada proses berpolitik di Indonesia (Rantung, 2017:58).

Pendidikan Agama Kristen bukan hanya menjadi arena dimana pengajar dan pembelajar membahas iman Kristen sebagai doktrin berdasarkan Alkitab dan tradisi gereja, tetapi juga membahas iman Kristen sebagai kehidupan. Pendidikan Agama Kristen mengingatkan pengajar dan membimbing pembelajar menyatakan kehidupan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, Pendidikan Agama Kristen merupakan upaya pembimbingan peserta didik mengenal pribadi dan ajaran Yesus Kristus, dan mewujudkan nilai-nilai hidup Kristus dalam memenuhi panggilan dan tugas hidup serta dalam menghadapi beragam tanggung jawab dan tantangan maupun peluang (Sidjabat, 2018:2).

Yesus Kristus sebagai dasar iman umat Kristen yang hadir di dalam dunia politis, menggunakan berbagai media politik dan hidup di tengah-tengah kelompok-kelompok politik yang mempunyai interes politisnya masing-masing. Kehadiran Yesus di dalam dunia selama sekitar tahun 7sM s.d. 30 Masehi tidak menjadi seorang yang menutup diri, tetapi Dia bersedia hidup dan bergaul dalam realitas keberagaman serta melalui teologi politik-Nya memberi solusi atas berbagai masalah sosial di pemerintahan dan masyarakat.

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik Teologi Politik Yesus sebagai sumbangsih bagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen di Politeknik Amamapare Timika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yakni suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data (Zed, 2008:1). Hal ini dilakukan karena pengumpulan data penelitian tentang Teologi Politik Yesus hanya bisa dilakukan melalui penelitian pustaka dan tidak mungkin dilakukan dengan penelitian lapangan.

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendasar mengenai Teologi Politik Yesus, peneliti menggunakan metode penelitian hermeneutik dengan pendekatan eksegesis. Penelitian hermeneutik yang penulis gunakan di sini adalah hermeneutik Alkitabiah di mana merupakan suatu bagian

Teologi yang bersifat ilmiah dan seni, yang melibatkan diri penafsir sepenuhnya, dengan tujuan mencari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab (Sutanto, 2000:1-3). Tujuan pemakaian ancangan hermeneutik-eksegesis pada data adalah untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai konteks yang memberikan makna dengan menggunakan proses analisis teks, analisis naratif, dan makna theologis (Subagyo, 2004:118).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Teologi Politik Yesus

Johann Baptist Metz, teolog Katolik Jerman yang dikenal sebagai pencetus teologi politik (*politische theologie*), mendasari teologi politik-nya pada konsep tentang kerajaan, kovenan, kebebasan, damai, keadilan, dan rekonsiliasi (dalam Davis, 1978:52). Teologi politik ada untuk melayani kepentingan Kerajaan dan menjadi bagian integral dari praktik keagamaan. Agama menjadi "agama politis" (*political religion*) yang mendasari kehidupan bersama dalam suatu *polis*. *Polis* merupakan *sakrale Gemeinschaft* (persekutuan suci) berdasarkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Sudah tentu agama (dan teologi di dalamnya) kemudian menjadi sumberdaya legitimasi magis-religius bagi sang penguasa.

Namun disintegrasi pandangan dunia agama dan metafisik yang dibawa oleh kritik Pencerahan, membawa kecenderungan kuat pada "privatisasi agama": agama berada di ranah batin manusia, menjadi urusan privat dan individualistik, yang sama sekali terpisah dari ranah publik yang menjadi urusan politik. Metz menyatakan, proses disintegrasi itu jangan ditafsirkan seakan-akan dunia kini sudah sepenuhnya di-demitologisasi dan disekularisasi sepenuhnya. Bagi Metz, "*religion was not completely privatized, and politics was not entirely secularized.*" Metz melihat bahwa berteologi merupakan panggilan pemuridan untuk berjalan mengikuti (*nachfolge*) jalan salib Yesus dan harus selalu memiliki dimensi politis. Panggilan itu secara fundamental merupakan keterlibatan politis, a *politically engagement*.

Di samping itu, Jürgen Moltmann, dalam kerangka logika teologi pengharapan, membahas kemungkinan-kemungkinan yang konkret untuk mengubah dunia pada sasaran-sasaran dan proses perubahan politis. Dalam sikapnya terhadap politik, kendati dalam arti

paling luas, sebagai cakrawala yang inklusif dari kehidupan umat manusia. Kebutuhan akan kerjasama dalam aksi politis untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang penuh harapan akan mencegah ancaman-ancaman terhadap masa depan bersama dari kemanusiaan. Dasar theologis Moltmann atas gerakan-gerakan politis itu adalah bahwa orang-orang Kristen seharusnya melihat di dalamnya "semangat yang berasal dari Roh Kristus". Roh sebagai perantara atau penghubung antara pengaruh yang mesianik dari Injil dan kemungkinan-kemungkinan dari dunia, yang menciptakan suatu solidaritas orang-orang percaya dengan kesengsaraan yang diderita seluruh ciptaan, dan menginspirasi kerjasama antara orang-orang Kristen dengan semua orang yang bekerja untuk membebaskan dunia ini dari kesengsaraan. Moltmann melihat penafsiran politisnya atas Injil pada iman Kristen yang mesianis, yakni suatu proses melawan kesengsaraan yang riil dan secara bersamaan merupakan imperatif kategoris untuk perwujudan yang revolusioner dari konsep-konsep keagamaan dalam pembebasan politis (dalam Bauckham, 1996: 56-60).

John Howard Yoder, seorang penggagas *political Jesus* di Amerika menyatakan, teologi politik merupakan suatu sistem teologi yang didasarkan pada karya Yesus Kristus dalam menyentuh dan bahkan menjadi solusi bagi berbagai masalah sosial. Kekristenan tidak boleh menghindari teologi politik, karena hal itu merupakan salah satu bagian tugas proklamasi Kristen dalam memperkenalkan Kekuasaan Allah (Ef 3:10). Hal itu menjadi titik tolak dalam memperjuangkan kekuasaan politik yang normal di dalam dunia. Dalam hal ini, gereja harus mampu mengintegrasikan iman dan respon sosial, yang secara khusus pada konteks politik (1975:159-162).

Di Indonesia, Andreas Yewangoe (2007) menunjukkan bahwa teologi politik mengacu kepada tanggungjawab sebagai warga Negara yang hidup dalam sebuah Negara dan atau masyarakat, serta merupakan jalan sebagai upaya dalam memperoleh kekuasaan (*power*). Kekuasaan pada dirinya bukanlah sesuatu yang buruk, asal saja dipakai bagi kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, tempat bagi setiap orang Kristen yang mau memperoleh kekuasaan adalah melalui partai politik, bukan gereja. Gereja tidak layak dipakai sebagai saluran untuk berpolitik

praktis, sebab gereja bukanlah partai politik. Gereja mesti berada *di atas* partai-partai politik yang ada. Tugas gereja adalah mengarahkan setiap umat Kristen untuk mempergunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya dan secara bertanggungjawab.

Teologi politik merupakan bagian teologi yang mendasarkan paradigma pada unsur praktis manusia, sehingga hal ini menjadi sebuah kendaraan yang efektif bagi penginjilan yang kontekstual tanpa harus meninggalkan keutuhan (keunikan) dogmatika Kristen.

Teologi Politik Yesus adalah penjelasan rasional yang bersumber dari Alkitab mengenai konsep dan praksis Yesus Kristus perihal sosio-politik yang merupakan tema sentral misi Yesus Kristus di bumi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa semua bentuk pengajaran dan praktik Yesus Kristus di bumi berpusat pada tema tentang "Kerajaan Allah". Menurut Walter Rauschenbusch, tema utama setiap penulis Injil dalam membahas misi Yesus di bumi adalah mengenai Injil Kerajaan Allah. Segala bentuk perumpamaan Yesus, pengajaran-pengajarannya tentang moralitas, dan berbagai bentuk nubuatannya, berada dalam fokus Kerajaan Allah tersebut (1959:485). Istilah Kerajaan Allah tersebut menunjuk pada pembahasan politik. Itu berarti, semua pokok pembahasan tentang dimensi sosial manusia di bumi terangkum di dalam satu tema politis Kerajaan Allah tersebut.

Kajian tentang Teologi Politik Yesus membahas tentang Yesus Kristus sebagai Mesias datang ke bumi bukan untuk mengadakan pembebasan dengan cara-cara kekerasan tetapi dengan anugerah sebagai ganti legalisme Yahudi yang menjurus kepada perlawanan politis. Namun bukan berarti Yesus menjauh dari urusan politik, tetapi menggunakan kendaraan politik untuk misi pembaharuan rohani. Maksudnya, urusan politik dan rohani seseorang harus berjalan seimbang. Jika menginginkan mobilisasi politik menjadi baik, maka setiap orang harus memiliki rohani (baca: moral atau batiniah) yang baik.

Untuk itu, Teologi Politik Yesus merupakan dasar edukasi utama untuk membentuk umat Kristen di masyarakat Indonesia yang mempunyai karakter sosialis-spiritualis.

B. Karakteristik Teologi Politik Yesus

1. Berorientasi pada Kesejahteraan Publik

Setiap individu dalam masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi pusat perhatian dan tujuan seperti: kekuasaan, pendidikan atau penerangan, kesejahteraan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran dan keadilan, serta kesegaran atau respek. Di sisi lain, masing-masing individu dalam masyarakat itu mempunyai kebebasan tanpa batas untuk mengejar nilai-nilai yang telah disebutkan di atas dengan berbagai macam cara menurut keinginannya masing-masing. Dua hal ini merupakan fenomena dalam masyarakat yang begitu berpotensi pada lahirnya konflik horizontal dan sekaligus memperkecilkan atau bahkan meniadakan peluang atas adanya kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Solusi dari fenomena tersebut adalah dengan cara di mana setiap individu dalam masyarakat harus memasuki dunia-dunia individu yang lain. Maksudnya, setiap individu memiliki bela rasa suka duka atas yang lain, dan menempatkan diri dalam tragedi serta keputusan mereka.

Hal inilah yang menjadi salah satu perjuangan politik Yesus di dalam dunia. Yesus tidak pernah lepas dengan tindakan-tindakan politis, sebab menurut Stott ada kebutuhan-kebutuhan sosial yang tanpa aksi politik yang seperlunya mustahil dapat dipenuhi (2000:74). Aksi politik Yesus merupakan bentuk tampilan kasih yang bekerja mewujudkan keadilan bagi yang tertindas, sekaligus sebagai agen perubahan sosial secara radikal untuk membebaskan setiap orang dari perbudakan.

Saat menjalankan misi tersebut, Kristus tidak pernah menutup diri dan bahkan merasa lebih benar dengan orang-orang yang ada di sekitar-Nya. Kristus tidak pernah melakukan eksploitasi politik, tetapi sebaliknya mengeksplorasinya. Dia memperkenalkan diriNya sebagai Seorang yang mempromosikan dan menghargai urusan politik, namun tidak bersikap kompromi. Dia tetap menampilkan diriNya sebagai Kebenaran Absolut di tengah-tengah kepalsuan dunia. Alasan tunggal kehadiran Kristus di dunia, khususnya dalam konteks sosial-politik, karena dosa yang mengikat setiap orang sehingga membuat mereka selalu terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa politis. Terjebaknya mereka dalam perbuatan-perbuatan dosa tersebut biasanya melahirkan kenikmatan-kenikmatan duniawi (baca: jasmaniah) yang sifatnya semu.

Salah satu gejala dalam pelayanan Yesus di hadapan umum adalah adanya “orang banyak” dari kalangan kaum jelata, massa, khalayak ramai, dan rakyat biasa di sekitar-Nya. Asal dan keberadaan mereka tidak jelas, tetapi mereka ada dan menjadi semacam latar belakang anonim yang mengerumuni Yesus. Pada situasi seperti itu Yesus melakukan dan mengajarkan beberapa hal dalam tujuan-Nya untuk mensejahterakan orang-orang yang mengerumuni-Nya tersebut, yaitu: *pertama*, Yesus sadar bahwa mendengar kepentingan orang-orang miskin (tidak terpendang) merupakan tindakan yang sangat sulit dilakukan bagi mereka yang hanya memfokuskan perhatian kepada kepentingan orang-orang kaya di dalam masyarakat. Itulah sebabnya Dia selalu memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan orang miskin atau orang-orang yang memerlukan pertolongan (bnd. Mat 15:23-24). Yesus menciptakan sebuah kesadaran politik yang baru, di mana setiap orang dalam masyarakat harus berhenti berpikir primordial dan berhenti berpolitik dengan mengandalkan mereka yang kuat dan berkuasa, sehingga semboyan “*feed the crowds and you shall be king*” sangat perlu diwujudkan (Yoder, 1975:31). *Kedua*, selain mendengarkan, Dia juga selalu memperhatikan kebutuhan orang lain walaupun diri-Nya harus menanggung resiko atas dampak dari tindakan-Nya tersebut. Ekonomi menurut Yesus tidak dihubungkan dengan usaha mencapai keuntungan sebesar-besarnya tetapi sebagai diakonia, yang mana merupakan pelayanan kepada mereka yang sangat membutuhkannya (mereka yang miskin, *preferential option for the poor*) dalam masyarakat (bnd. Mat 19:21; 26:11). *Ketiga*, Yesus menempatkan diri-Nya sebagai seseorang yang hidup bersama dengan orang-orang lain di masyarakat dalam semangat kekeluargaan. Tindakan ini akan melahirkan sikap saling memperhatikan dan saling memberdayakan satu sama lainnya sehingga akhirnya seluruh kelompok menjadi kuat atau berdaya, dalam arti tidak tergantung secara mutlak pada yang lain (bnd. Mat 25:42-45). *Dan keempat*, Yesus menunjukkan bahwa kerukunan dalam bermasyarakat hendaknya terjadi di dalam suasana pergaulan yang wajar (bnd. Mat 7:12), bukan kerukunan multikulturalisme yang selalu dipupuk dengan motif kemunafikan atau pun kerukunan yang telah ditentukan dan di atur dari atas (kaum elite). Dalam apa yang

dilakukan-Nya itu, Yesus dipandang sebagai wujud kekuasaan dan pemerintahan Allah di dunia, alat pemulihan, penyembuhan, dan pembebasan manusia dari berbagai belenggu. Untuk itulah Yesus dikenal sebagai Pemimpin Kharismatis yang bercorak mesianis dan eskhatologis. Sebagai alternatif terhadap otoritas yang menindas (tangan besi), Yesus menawarkan pola yang melayani dan menghargai manusia.

Yesus dalam melaksanakan misi Bapa di dunia selalu membentuk mental baru pada setiap warga Kerajaan Sorga supaya memiliki *the mind of Christ*. Mental seperti ini yang hendak menghentarkan warga Kerajaan Sorga untuk terlibat secara publik dalam upaya-upaya keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan warga Kerajaan Sorga di tengah-tengah masyarakat tersebut digambarkan Yesus dalam metafora “garam dan terang” (Mat 5:13-16). “Garam” menunjuk pada pengertian kemurnian dan loyalitas warga Kerajaan Sorga terhadap kovenan Allah, sedangkan “terang” memiliki makna bahwa melalui hidup warga Kerajaan Sorga akan mentransformasi setiap orang supaya memusatkan diri pada kehendak Allah (Stassen dan Gushee, 2008:616-621).

2. Mensinergiskan Agama dan Negara:

Menolak Negara Agama/Agama Negara

Yesus sangat menjunjung tinggi akan pentingnya urusan religius dan ideologis; namun dalam hal ini, Yesus tidak pernah mencampuradukkan kedua hal tersebut. Baginya, urusan religius adalah hal-hal yang bersifat vertikal, yang mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan seluruh aspek hidupnya kepada Sang Pencipta, sehingga hal ini berhubungan dengan perkara rohani seseorang (*spiritual things*); sedangkan urusan ideologi merupakan hubungan setiap orang dengan sesama menurut tingkat-tingkat piramida politis (pemerintah dan masyarakat, kaum elit dan kaum jelata, dll.), yang di dalamnya setiap orang harus saling mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuatnya berdasarkan tingkat-tingkat politis tersebut. Hal ini sangat jelas termaktub dalam ungkapan Yesus bahwa: “... berikanlah kembali kepada Kaisar apa saja yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah” (Mat 22:21).

Matius menunjukkan ajaran Yesus dalam mensinergiskan otoritas Negara dan agama

(Yoder, 1975:53). Ketika murid-murid dari orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bertanya tentang hal memberi pajak kepada Kaisar, Yesus menjawabnya dengan analogi “uang logam” (koin). Dia bertanya kembali tentang “gambar dan tulisan” yang ada di koin tersebut. Sebagai jawabannya, mereka mengakui bahwa di koin tersebut ada “gambar dan tulisan Kaisar”. Memang setiap uang logam saat itu, pada satu sisi terdapat gambar kepala Kaisar sedangkan di sisi yang lain terdapat tulisan yang biasanya bertuliskan kalimat: “Kaisar adalah jelmaan Tuhan” (Wiseman dan Wheaton, 2000:515-520). Gambar saat itu menunjuk kepada hak kepemilikan (Clines, 2000:326). Hal ini berarti bahwa koin yang ada gambar dan tulisan Kaisar itu adalah milik Kaisar, sehingga sudah sepatutnya benda itu dikembalikan kepada Kaisar; namun setiap orang pada dasarnya merupakan “gambar Allah” (Kej 1:27; 9:6, *imago Dei*), sehingga sudah sepatutnya setiap orang mempersembahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah (Yoh 4:22-24; Rom 12:1). Kata perintah “berikanlah” dalam ayat 21 menggunakan kata Yunani *apodidōmi* yang secara literal dapat diartikan “memberi kembali setelah diberi” (sikap balas budi). Maksudnya, pemerintah dunia yang telah memberikan secara lahiriah kenyamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya; harus diresponi dengan cara patuh dan tunduk pada pemerintah dunia (dalam batas-batas tertentu). Sedangkan Tuhan yang telah memberikan pemeliharaan batiniah (rohani) harus menggerakkan kaum pilihan khususnya, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini merupakan langkah wajib yang tidak dapat ditolak.

Yesus sedang menunjukkan perbedaan yang tajam antara pemerintah dunia dengan pemerintahan Allah, tapi bukan berarti berlawanan. Pemerintah dunia mengurus hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan pemerintahan Allah mengurus hal-hal yang bersifat rohaniah. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa terhadap hal-hal lahiriah manusia. Tuhan telah memberikan “mandat-Nya” kepada pemerintah dunia untuk mengurus hal itu; namun dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah dunia harus selalu tunduk pada prinsip-prinsip ilahi (berdasarkan Wahyu Umum atau sering juga disebut Kebenaran Umum). Itulah sebabnya pemerintahan dunia yang bersifat religius (Negara agama dan agama Negara)

merupakan suatu bentuk yang absurditas dan lahir dari sikap pemaksaan terhadap otoritas ilahi.

Yesus hendak menegaskan bahwa biarkan Negara mengurus apa yang menjadi urusannya dan sebaliknya biarkan agama mengurus apa yang menjadi urusan agama. Negara (ideologi) tidak boleh ikut-ikutan dengan berbagai bentuk urusan agama (religi), dan juga sebaliknya agama tidak boleh ikut-ikutan dengan berbagai urusan Negara (Davis, 1978:17). Walaupun agama berada dalam daerah kekuasaan sebuah Negara, namun bagi Yesus kedua kekuatan ini (Negara dan agama) memiliki daerah jangkauan otoritasnya masing-masing. Itulah sebabnya Negara harus menjamin kebebasan seseorang untuk beragama, dan sebaliknya agama harus menjamin kebebasan seseorang untuk bernegara. Misalnya mengenai moralitas manusia, Negara hanya berurusan dengan moralitas yang kelihatan dari setiap orang (e.g. mencuri, korupsi, penganiayaan, dll.), sehingga *judgement* yang diberikan selalu berdasarkan undang-undang yang telah disahkan berdasarkan suara bersama dan kesepakatan bersama dalam sebuah Negara; sebaliknya agama hanya berurusan dengan unsur rohaniah setiap orang, di mana dalam setiap kejahatan moral yang dilakukan setiap orang, agama tidak berhak dan tidak ada wewenang sedikitpun untuk memberikan hukuman secara fisik, namun yang harus dan wajib diberikan oleh agama adalah berupa nasihat dan bimbingan (*guidance*) rohani sebagai bentuk dari *religious care*.

Namun dalam hal ini Stott mengungkapkan bahwa hukum moral Allah adalah "hukum alami" yang memiliki hubungan timbal balik yang fundamental (2000:71). Hukum agama (hukum Allah yang tercakup dalam teologi kovenan) mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, sebab menurut Hollerich hal ini merupakan "a sociology of juristic concepts" (2004:111). Rumusan ini merupakan intisari dari rumusan politis Yesus dalam ungkapan-Nya bahwa: "tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu" (Mat 6:33). Paradigma Kerajaan Allah dan Kebenaran-Nya melahirkan berbagai sikap moralitas manusia yang terpuji sehingga menurut Fiorenza dapat membentuk komunitas politis

lokal maupun komunitas politis universal (2001:75).

Dalam hal ini, Yesus tidak bermaksud untuk mendirikan sebuah Negara agama yang didasarkan atas agama tunggal Negara (seperti yang diperjuangkan oleh berbagai gerakan fundamentalis agama yang berpemahaman sempit), namun Yesus hendak menyadarkan setiap orang untuk selalu mengucap syukur akan pemeliharaan dan keselamatan pasti di dalam Yesus Kristus yang hanya bisa diberikan oleh Allah, dan tidak dapat dilakukan orang manapun di dalam dunia. Jadi Yesus tidak pernah menjalankan politik agama.

3. Theokrasi dalam Demokrasi

Yesus secara konkrit dan historis menundukkan seluruh kekuasaan dalam dunia di bawah kekuasaan Allah (bnd. Mat 4:10b). Ini berarti bahwa segala bentuk kekuasaan dunia harus selalu di dasari oleh prinsip-prinsip kekuasaan Allah (theokrasi). Setiap bentuk kekuasaan dunia yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip kekuasaan Allah tidak pernah akan bertahan lama dan setiap individu yang mengambil bagian di dalamnya pasti mendapat hukuman dari Allah.

Yesus berkata dalam Matius 6:24, "tak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain." Berdasarkan ungkapan tersebut, bukan berarti Yesus tidak menginginkan adanya kekuasaan dunia, tetapi Yesus hanya menunjukkan bahwa pusat perhatian utama setiap orang harus selalu pada kekuasaan Allah. Hal ini dipertegas oleh Yoder, bahwa "*man's subordination to these Powers is what makes him human, for if they did not exist there would be no history nor society nor humanity. If then God is going to save man in his humanity, the Powers cannot simply be destroyed or set aside or ignored. Their sovereignty must be broken*" (1975:147).

Setiap anggota warga Kerajaan Sorga diberikan pemahaman baru tentang kekuasaan (otoritas) dan memiliki kapabilitas dalam melaksanakan semua kebenaran. Tunduk pada kekuasaan Allah (theokrasi) dalam memegang suatu kekuasaan adalah pilihan yang sangat tepat. Melalui hal itu, seseorang akan dimampukan untuk menampilkan kekuasaan berdasarkan kasih

dan dibangun atas dasar kepentingan umum. Seorang yang memegang kekuasaan dalam prinsip theokrasi adalah seseorang yang tidak menjadikan kepentingan umum sebagai alasan bagi tercapainya kepentingan pribadi. Kekuasaan bukanlah sebuah upaya untuk mendapatkan pengaruh, tetapi sebaliknya kekuasaan yang mempengaruhi setiap orang supaya saling memperhatikan dengan kasih tanpa menuntut balas. Kekuasaan yang dimiliki juga harus mampu mengubah setiap orang yang terikat dalam dosa, yang selalu condong dengan tingkah laku dosa seperti korupsi, supaya dikuasai oleh Kebenaran Yang Absolut itu sehingga memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap berbagai perbuatan dosa. Seperti diktum Origen yang dikutip Cavanaugh bahwa: "*Where there is sin, there is multiplicity*" (2006:201).

Kekuasaan hendak membawa seseorang pada kewibawaan yang sejati. Namun kewibawaan itu bukan diperoleh dari watak yang keras, penuh keangkuhan, kekerasan, dan "tidak pernah senyum" itu; tetapi wibawa itu lahir dari watak yang penuh dengan kelembahlembutan, suka memperhatikan orang yang menderita berdasarkan kasih, dan teguh pada komitmen. Kewibawaan seperti ini akan membawa setiap individu yang memangku kekuasaan pada sikap menghargai suara bawahan (suara rakyat), tidak mendasarkan setiap keputusan pada *self-interest*, serta tidak memihak.

Demokrasi sesungguhnya merupakan aksi balasan dari sistem pemerintahan Aristokrasi. Aristokrasi berasal dari masa Mycenaen, Yunani sekitar tahun 1400-1200 sM. yang sangat berbasis militer dan pada masa Homeric tahun 1000-800 sM. yang terdiri dari keturunan kelas pemilik tanah. Prinsip yang mendasari aristokrasi adalah kesadaran tentang adanya kecakapan yang berbeda dan keyakinannya bahwa tidak semua orang dapat memerintah (Sirait, 2006:34). Pada intinya Aristokrasi sangat menggantungkan diri bukan pada sistem tetapi pada kecakapan, kejujuran, kapasitas atau kemampuan seorang pemimpin. Pemerintahan yang bersifat Aristokrasi selalu berfokus pada unsur subjektif dan unsur ekonomis dari seorang yang berkuasa, seperti seorang yang kaya menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermakna lain daripada seorang yang miskin. Itulah sebabnya sistem demokrasi lahir untuk memerangi sistem pemerintahan seperti itu.

Definisi demokrasi diungkapkan oleh Abraham Lincoln melalui pidatonya di Gettysburg tahun 1863, yakni: *government of people, by people, for the people*. Sistem demokrasi yang berdasarkan definisinya tersebut sebenarnya merupakan suatu sistem yang baik, namun menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan penuh kekerasan karena ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan individualis dan suatu kelompok tertentu. Demokrasi selalu berlangsung dengan berbagai bentuk tindakan anarkis massa dan tuduhan-tuduhan yang selalu bersifat negatif serta provokatif. Hukum dihancurkan dengan demokrasi, yang seharusnya hukum menjadi dasar pijakan tunggal demokrasi.

Demokrasi seringkali condong kepada bentuk kekuasaan yang mempertuhankan manusia, di mana pada jaman Yesus menjadi satu hal yang sangat bertolak belakang dengan sistem theokrasi. Namun bukan berarti Yesus tidak menghendaki suatu kekuasaan yang bersifat demokratis, tetapi Yesus lebih menekankan kepada kekuasaan demokratis yang berlandaskan theokratis.

Maksudnya, segala sesuatu yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan harus selalu bersifat *people-center* (berpusat pada rakyat) namun usaha pencapaian dan realisasi pemerintahan (baca: kekuasaan) itu harus didasarkan pada prinsip theokrasi yang berdiri di atas kasih, keadilan dan kebenaran. Yoder mengungkapkan, berbagai sistem pemerintahan atau kekuasaan di dunia merupakan bagian dari tujuan kreatif Allah dan semua berada dalam kontrol serta pemeliharaan Allah (1975:142).

4. Menjamin Hak Azasi Manusia

Kehadiran Yesus di dunia juga memberikan contoh dalam memperjuangkan dan menjamin hak azasi manusia. Di tengah-tengah masyarakat yang ditata secara kaku menurut golongan-golongan tingkat sosial, ras, dan harta, dan kepalsuan realisasi kebebasan manusia dalam bentuk "Pax Romana" (France, 1996:75), Yesus tidak pernah diam ketika berhadapan dengan berbagai bentuk penindasan terhadap kebebasan dalam menganut sebuah kepercayaan, kebebasan untuk hidup layak, kebebasan untuk bergaul dengan sesama, kebebasan untuk bersuara (mengeluarkan pendapat), kebebasan untuk menjalani kehidupan berdasarkan iman yang dianut, dan

segudang bentuk kebebasan manusia lainnya (Mat 17:24-27). Keberadaannya yang suka bergaul dengan kaum elit (e.g. pemungut cukai) dan kaum jelata (e.g. janda) menandakan bahwa diri-Nya tidak pernah melakukan tindakan diskriminatif. Sebab sikap menekan kebebasan orang lain pasti lahir dari sikap diskriminasi. Namun pembelaannya terhadap berbagai bentuk hak azasi manusia itu tidak dibarengi dengan tendensi keuntungan pribadi, sebab tujuan utamanya hanyalah menjalankan misi pengampunan Allah bagi kaum pilihan-Nya.

Yesus tahu bahwa hak azasi manusia bisa menjadi "kuda tunggangan" setiap individu yang mengejar keuntungan pribadi lewat sistem demokrasi sehingga membuat kekacauan dalam sebuah pemerintahan. Itulah sebabnya Yesus mengeluarkan *statement* bahwa "berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah" (Mat 26:41). Ungkapan tersebut memberikan makna bahwa kebebasan manusia tidak sepenuhnya bebas; namun kebebasan manusia itu berada dalam segudang peraturan yang ada. Maksudnya, kebebasan manusia itu merupakan kebebasan untuk hidup di bawah peraturan-peraturan yang ada; dalam hal ini, "Kedaulatan Allah" yang menaungi dan menjadi dasar bagi setiap peraturan tersebut.

Ajaran Yesus mengenai hak azasi manusia ini juga diceritakan Matius pada tindakan Yesus di Hari Sabat (Mat. 12:1-14). Pada bagian ini Matius mengisahkan tentang protes kaum Farisi atas tindakan Yesus dan murid-murid-Nya pada hari Sabat. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan Yahudi, hukum ke empat dalam Hukum Taurat berbunyi: "ingatlah hari Sabat itu supaya menjadi kudus" (Kel 20:8, terjemahan tersebut adalah terjemahan literal penulis, sebab Lembaga Alkitab Indonesia [LAI] menambahkan kata penghubung "dan" (waw) yang tidak ada dalam teks asalnya).

Menurut struktur kata dalam teks asalnya (teks Ibrani), kata *qādasy* (*consecrate, dedicate*) sesungguhnya menjelaskan kata *syabbāth* (Sabat) yang berarti bahwa hari Sabat itu memiliki status tetap yaitu kudus. Tanpa dikuduskan oleh manusia pun hari Sabat itu tetap kudus. Bentuk *piel* pada kata *qādasy* memberi pengertian "mengabdikan diri". Maksudnya, Allah menghendaki setiap umat-Nya mengabdikan dirinya untuk hari

Sabat dan prinsip dasarnya adalah kasih. Dengan lain pengertian, tindakan apapun yang bertujuan mengabdikan diri untuk hari Sabat dapat dilakukan pada hari Sabat. Inilah yang menjadi alasan murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Contoh yang dinyatakan Yesus kepada orang-orang Farisi, yang mana Daud dan imam-imam "melanggar" hukum Sabat, menjadi suatu perbuatan yang tidak salah karena alasan tersebut di atas.

Yesus juga mengatakan bahwa "Anak Manusia adalah Tuhan milik hari Sabat" (Mat. 12:8, frase "hari Sabat" dalam bahasa asalnya (Yunani) menggunakan bentuk genitif (*tu sabbatou*) yang lebih tepat diterjemahkan "milik hari Sabat"). Istilah "Tuhan" pada bagian ini bukan menunjuk kepada "nama" atau "gelar", tetapi lebih tepat menunjuk kepada "pemegang otoritas". Demikian juga dengan frase "Anak Manusia" dalam pola pemikiran Matius selalu menunjuk kepada Pribadi Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus hendak menyatakan yang mana Dialah yang memiliki hari Sabat dan Dia mempunyai otoritas mutlak atas hari Sabat. Jadi apapun yang dipandang benar oleh Yesus tentang hari Sabat, itulah yang sebenarnya menjadi patokan kebenaran dan peraturan yang harus dijalankan.

Dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia dan setiap hukum yang ada jangan sama sekali menekan hak azasi manusia. Namun itu bukan berarti bahwa hak azasi tidak berada di bawah koridor peraturan yang ada. Hak azasi seseorang sangat terkait dengan etika moral dan kepercayaan yang dianut orang tersebut. Itulah sebabnya faktor "mengetahui" karakteristik etika moral dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang sangat penting. Memprotes hak azasi seseorang berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh orang lain merupakan tindakan yang absurd. Terkadang prinsip *exception firmat regulam* (pengecualian membenarkan peraturan) diperlukan sebagai sikap persuasif dalam memperjuangkan hak azasi manusia; asalkan hal itu bertolak dari unsur belas kasihan untuk berbuat baik kepada sesama dan bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Menolak Diskriminasi

Respon Yesus atas diskriminasi diredaksi Matius dengan sangat jelas pada kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya (Mat. 15:21-28). Seorang perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepada Yesus, tidak langsung dijawab oleh-Nya bukan karena Dia tidak punya belas kasihan tetapi karena Yesus hendak melihat respon orang-orang saat itu yang pada kenyataannya menolak (mendiskriminasi) perempuan tersebut. Memang sebuah kenyataan yang juga berlaku sampai saat ini, di mana seseorang yang lemah secara ekonomi pasti tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Yesus mengungkapkan bahwa “Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel” (Mat. 15:24). Istilah “diutus” (*apostellō* lit. “mengirim”) secara lebih spesifik menunjuk kepada suatu proyek misi ilahi yang sedang dijalankan; sedangkan untuk istilah “hilang” (*apollumi*) secara literal dapat berarti “dihancurkan”, “dianggap hina”. Jadi, ungkapan Yesus itu berarti, menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi adalah bagian dari misi Allah di dalam dunia. Yesus hendak menghancurkan budaya diskriminasi dengan cara menjawab permintaan perempuan itu melalui analogi “anjing”. Hal ini juga dilakukan demi menghindari dari jebakan dan serangan orang-orang Yahudi yang tidak menyukainya. Matius menggunakan istilah Yunani *kunarion* untuk kata “anjing” pada bagian ini, yang menunjuk kepada anjing kesayangan (Howley, 2000:54). Artinya bahwa istilah anjing dalam teks ini memiliki konotasi positif.

Dalam budaya Yahudi, anjing dipandang sebagai hewan yang penuh kenajizan; tetapi dalam budaya Roma anjing dipandang sebagai hewan yang termulia dan patut dihormati, karena anjing dalam legenda Roma mempunyai peran penting bagi pendiri Roma. Konon ada sebuah legenda dalam kebudayaan Roma: seorang perempuan yang bernama Rhea Silvia dipaksa bernazar oleh adik ayahnya yang bernama Amulius untuk tidak mempunyai anak. Namun ternyata Rhea melanggar nazarnya itu karena dia mempunyai anak kembar yang bernama Romulus dan Remus, dari hubungannya dengan dewa Mars (dewa peperangan). Hal ini diketahui oleh Amulius, sehingga kedua anak tersebut diperintahkan untuk ditenggelamkan di Sungai Tiber. Tetapi oleh ibu mereka (Rhea) diletakkan di sebuah palungan dan hanya diapungkan di sepanjang sungai tersebut. Singkat cerita, kedua anak itu

suatu waktu ditemukan oleh seekor anjing betina. Anjing tersebut membesarkan Romulus dan Remus hanya dengan air susunya. Pada akhirnya, Remus mati terbunuh sedangkan Romulus berhasil membangun sebuah kota yang besar dan kota itu dinamai Roma, sesuai dengan namanya. Romulus dipercaya berubah menjadi dewa karena dia menghilang dalam suatu peristiwa yang aneh (dihilangkan oleh badai). Itulah sebabnya orang-orang Roma tetap menyembahnya sebagai dewa Quirinus (Encyclopædia Britannica, 2009).



Patung Romulus dan Remus bersama ibu angkat (anjing) mereka (500-480 BC) Berada di Museum Capitoline – Roma

Di dalam wilayah penjajahan Roma yang begitu luas saat itu (termasuk daerah Tirus, Sidon, dan Kanaan tempat asal perempuan itu), sangat jelas kalau berbagai bentuk inkulturasi kebudayaan Roma pun berlaku bagi seluruh daerah jajahannya. Itulah sebabnya, perempuan Kanaan itu mengetahui dengan jelas kisah tentang “anjing” dalam kebudayaan Roma, tetapi tidak begitu tahu makna “anjing” dalam kebudayaan Yahudi, dikarenakan Yudaisme terkenal dengan eksklusivisme absolutnya. Melalui hal ini, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa orang-orang Yahudi yang ada saat itu mengira bahwa Yesus sedang menghina dan bahkan mendiskreditkan perempuan itu; namun sesungguhnya pemahaman Yesus senada dengan pemahaman perempuan Kanaan itu, di mana Yesus sedang menghargai dan bahkan mengangkat derajat perempuan tersebut sebagai seorang yang patut dihormati. Pemahaman tersebutlah melahirkan jawaban optimistis dari perempuan Kanaan, yang menurut Yesus sebagai seorang yang mempunyai iman yang besar.

Dari kisah tersebut, jelas Yesus menolak diskriminasi. Menghargai orang lain dan mengangkat derajat kaum yang termarginalkan diajarkan Yesus sebagai tindakan wajib dari warga Kerajaan Sorga. Sebenarnya saat itu, orang-orang Yahudilah

yang mengalami diskriminasi yang hebat dari bangsa Roma, namun Yesus tetap mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tetap mampu menghargai orang lain, walaupun orang yang dihargai sedang tidak menghargai mereka.

6. Mengaktualisasi Hukum yang Tidak Memihak dan Non-Kompromistis

Menurut Donovan, kekurangpahaman pada teori politik akan berdampak buruk bagi aksi politik, sehingga melahirkan ekspresi politik yang egosentris (1996:15). Sesungguhnya hukum yang memihak kepada salah satu golongan tertentu hanya didasarkan oleh cita-cita zona nyaman dari golongan yang berpemahaman sempit, dan melalui itu pasti akan bermunculan berbagai sikap kompromistis yang disampaikan dalam bentuk-bentuk argumentasi manipulatif demi membela golongan yang dimaksud.

Bagi Yesus, jika kebenaran sudah dijadikan legalisme absolut, yang mana "kebenaran" tersebut hanya dijadikan alasan untuk menghakimi orang lain, maka hal itu pasti menuju pada sikap fanatisisme. Yesus menghendaki bahwa pengamalan iman itu harus secara eksklusif dan tidak secara fanatik. Itulah sebabnya Yesus selalu menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki di jaman-Nya sebagai tindakan-Nya dalam membukakan pemahaman mereka tersebut yang sedang terjebak dalam sikap fanatisisme.

Menurut Yoder, misi penebusan Yesus merupakan misi untuk membeli kebebasan manusia dari perbudakan dosa dan sebagai suatu substitusi hukuman dalam membayar harga hukum yang telah dirusakkan oleh dosa (1975:102). Oleh sebab itu, misi penebusan Yesus merupakan misi Allah yang salah satunya bagi perbaikan hukum yang sudah disalahgunakan karena dosa manusia.

Yesus tidak pernah pilih kasih. Yesus selalu mendasari etika politis-Nya pada kekonsistenan dan kedisiplinan, sehingga hukum yang disampaikan merupakan hukum yang menjunjung tinggi nilai universal, dan aktualisasi hukum-Nya selalu kepada tindak kejahatan setiap orang serta tidak didasarkan pada perasaan "balas budi" atas nilai pemberian donasi dari si pelaku kejahatan. Hukum harus selalu dibangun di atas kebenaran dan kebenaran itulah yang akan selalu memberi hikmat bagi pelaksanaan hukum.

Stott menegaskan, bukan berarti setiap dosa manusia harus dihukum berdasarkan hukum negara, karena ada hal-hal tertentu di dalamnya yang berhubungan dengan daerah privasi seseorang. Fungsi utama undang-undang ialah melindungi nilai-nilai sosial yang sudah diakui dan menjamin hak-hak para warga (2000:73).

Sebuah hukum yang diberlakukan secara nasional haruslah didasarkan pada situasi dan kondisi yang tepat serta tidak memihak. Penyusunan hukum yang didasarkan pada salah satu ideologi dalam sebuah Negara (subyektif) tidak mungkin dapat mensejahterakan masyarakatnya. Hukum harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dari sifat majemuk bangsa dan tanpa ada sedikitpun dipengaruhi oleh ideologi suatu kelompok tertentu (obyektif).

PENUTUP Kesimpulan

Teologi politik Yesus berangkat dari tema Kerajaan Allah yang dihadirkan di bumi sebagai sebuah sistem berpikir dan bertindak politis yang seimbang oleh setiap umat Kristen. Dalam realisasinya, kebenaran dan keadilan selalu menjadi titik berpijak serta Kemuliaan Allah menjadi tujuan utama bagi berbagai bentuk kekuasaan di dunia yang didorong oleh dedikasi yang tinggi menjalankan tugas politis dalam menolong orang lain yang mengalami kesusahan karena perasaan simpati dan empati atas dasar kasih yang sejati bagi problematika sosial.

Karakteristik Teologi Politik Yesus sebagai frame idea dan frame work peran sosial-politik Kristen di Indonesia adalah berorientasi pada kesejahteraan publik, mensinergiskan agama dan negara yang mana menolak negara agama dan agama negara, theokrasi dalam demokrasi, menjamin hak azasi manusia, menolak diskriminasi, serta mengaktualisasi hukum yang tidak memihak dan non-kompromistis.

REFERENSI

- _____, 2009. *Encyclopædia Britannica*, "Romulus and Remus", [Ultimate ReferenceSuite](#).
Chicago: Encyclopædia Britannica.
- _____, 2000. "Uang", "Gambar", "Anjing" dalam *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid. 1*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.

- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bauckham, Richard. 1996. *Teologi Mesianis: Menuju Teologi Mesianis Menurut Jürgen Moltmann*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Berkhof, Louis. 2002. *Teologi Sistematis 3*. Surabaya: Momentum.
- Davis, Charles. 1978. *Theology and Political Society*. Cambridge: Cambridge University.
- Erickson, Millard J. 1992. *Introducing Christian Doctrine*, edited by. L. Arnold Hustad. Grand Rapids: Baker Book.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. 2001. *Jesus and The Politics of Interpretation*. Continuum: Continuum International Publishing Group.
- France, R. T. 1996. *Yesus Sang Radikal: Potret Manusia yang Disalibkan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- O'Donovan, Oliver. 1996. *The Desire if The Nations: Rediscovering The Roots of Political Theology*. Cambridge: Cambridge University.
- Rantung, Djoys Anake. 2017. Pendidikan Agama Kristen dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk di Indonesia. *Jurnal Shanana*, Vol. 1 No. 2, 58-73.
- Rauschenbusch, Walter. 1959. "Christianity and The Sosial Crisis", in *Classics of Protestantism*, edited by Vergilius Ferm. New York: Philosophical Library.
- Sidjabat, Binsen S. 2018. Pendidikan Politik: Telaah Materi Ajar PAK di Perguruan Tinggi Umum. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, Vol. 2 No. 1, 1-17.
- Sirait, Saut. 2006. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Stassen, Glen H. & David P. Gushee. 2008. *Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context*, Peter Suwadi Wong, terj. Surabaya: Momentum.
- Stott, John. 2000. *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani: Penilaian atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Komunikas Bina Kasih.
- Subagyo, Andreas B. 2004. *Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Sutanto, Hasan. 2000. *Hermeneutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab*. Malang: SAAT.
- Yewangoe, Andreas A. 2007. "Tanggung Jawab Kristen di Bidang Politik", disampaikan dalam "Bincang-Bincang PILKADA DKI 2007" yang diselenggarakan di GPIB Paulus.
- Yoder, John Howard. 1975. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids: William B. Eerdmans.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.